

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI PENYANDANG CACAT

Lilis Wahyuni

Program Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Evaluation of Rehabilitation of Disabled Persons Program. This study aimed to evaluate the implementation of the Disabled Rehabilitation Program at the Department of Social Dumai. This research is a descriptive study with qualitative approach. Informants in this study are those that play a role in the implementation of the Disabled Rehabilitation Program at the Department of Social Dumai. Data collection technique were interview, observation and documentation. Analysis of data through data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the implementation of the Rehabilitation of Persons with Disabilities Program in Social Service Dumai seen from indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy, there are still many shortcomings. None of the evaluation indicators used can be fulfilled in the Implementation of the Programme of Rehabilitation of Persons with Disabilities on Social Department Dumai.

Keywords: effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, disabled persons

Abstrak: Evaluasi Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berperan dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai yang dilihat dari indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan, masih banyak terdapat kekurangan. Tidak ada satupun indikator evaluasi yang digunakan dapat terpenuhi dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai.

Kata kunci: efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, penyandang cacat

PENDAHULUAN

Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional dilandasi tujuan untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Penciptaan tujuan diwujudkan melalui berbagai program pembangunan di segala bidang yang saling terkait sebagai bagian dari pembangunan nasional. Salah satunya adalah Pembangunan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Cacat.

Hakikat pembangunan kesejahteraan sosial adalah upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial peorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat. Se-

hingga setiap orang mampu mengambil peran dan menjalankan fungsinya dalam kehidupan. Termasuk dalam hal ini adalah penyandang cacat. Penyandang cacat merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dengan mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat hidup layak dan sejajar dengan warga masyarakat lainnya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28 huruf H (3), mengamanahkan bahwa tiap warga Negara Indonesia berhak atas penghidupan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial sehingga memungkinkan mereka untuk memiliki

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan bermartabat.

Kebijakan pemerintah dalam penanganan penyandang cacat, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial (UPKS) bagi penyandang cacat. Berdasarkan kedua aturan tersebut, dikemukakan bahwa pemerintah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab yang sama dalam melakukan pembinaan demi kesejahteraan penyandang cacat.

Kota Dumai sebagai salah satu kawasan industri dan merupakan jalur perdagangan barang dan jasa karena letaknya strategis sebagai jalur transportasi penghubung di pulau Sumatera. Disamping itu Jumlah penduduk Kota Dumai, berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk (SP) tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai untuk sementara mencatat sebanyak 254.300 jiwa yang terdiri dari 131.700 laki-laki dan 122.600 perempuan. Kecamatan yang paling besar jumlah penduduk dan penyebaran penduduknya seperti dirangkum data BPS terdapat di Kecamatan Dumai Barat, dengan jumlah penduduk sebanyak 90.100 jiwa dengan tingkat penyebaran 35,42 persen. Sementara, kecamatan yang paling kecil dan rendah jumlah penduduk dan penyebaran penduduknya, yakni Kecamatan Medang Kampai, sebanyak 10.200 jiwa dengan tingkat penyebarannya 4,01 persen.

Dari jumlah jiwa tersebut nampaknya masih terdapat penduduk Kota Dumai yang menyandang masalah sosial. Dalam rangka penanganan terhadap masalah sosial ini maka Pemerintah Kota Dumai dalam hal ini Dinas Sosial senantiasa berupaya dan mengambil langkah-langkah yang strategis dalam rangka membangun kesejahteraan sosial dengan membuat Program Rehabilitasi Penyandang Cacat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor: 47 Tahun 2011 tentang tugas, fungsi dan uraian tugas Dinas Sosial Kota Dumai, seksi rehabilitasi penyandang cacat

mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi, pembinaan, pelayanan, bimbingan dan penanganan rehabilitasi bagi penyandang cacat.

Tujuan dari Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai adalah terbina dan terentasnya penyandang cacat sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Kegiatan pokok Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai meliputi 1) Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan, 2) Pemberian Bantuan kepada Penyandang Cacat di Kota Dumai, dan 3) Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik.

Berhasil tidaknya suatu program atau kebijakan menurut Huntington dalam Zainal (2012) adalah partisipasi masyarakat yang merupakan ciri khas dari masyarakat modern. Di negara-negara yang belum modern, sebagian besar masyarakatnya belum merasa penting untuk berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah. Mereka belum merasa bahwa kebijakan pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kehidupannya, apalagi untuk berpikir bahwa mereka mempunyai hak dan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah itu untuk kepentingannya. Bagi mereka, urusan pemertintahan adalah urusan para elite, yakni mereka yang berada di luar kehidupan mereka.

Program rehabilitasi penyandang cacat adalah merupakan kebijakan Pemerintah Kota Dumai, berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 47 Tahun 2011. Untuk mengevaluasi kebijakan program rehabilitasi penyandang cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai, digunakan kriteria evaluasi kebijakan dari William N. Dunn (2003) yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan program rehabilitasi penyandang cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba menggambarkan secara terperinci mengenai keadaan yang ada ditemui di lapangan sehingga dapat memberikan gambaran yang signifikan dalam penjelasan. Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kota Dumai, Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Bidang Rehabilitasi, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Penerima Program Rehabilitasi Penyandang Cacat. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan digunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Metode analisis data menggunakan analisa kualitatif dengan proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Efektivitas

Setelah dilakukan penelitian dapat dilihat efektivitas dari Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai yang dilihat dari ketepatan dalam sasaran dan pencapaian tujuan. Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai, sudah tepat pada sasarannya yaitu Penyandang Cacat di Kota Dumai dan Organisasi Sosial yang merupakan dari mitra Dinas Sosial Kota Dumai terdiri dari Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Karang Taruna. Sedangkan untuk pencapaian tujuan dari Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai tidak mencapai tujuan. Penyandang Cacat di Kota Dumai yang mendapat bantuan banyak yang tidak mampu untuk memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik mungkin. Sehingga dengan adanya hal ini membuat mereka belum dapat mandiri seperti yang diharapkan.

Efisiensi

Jumlah anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk memberikan bagi semua penyandang cacat di Kota Dumai, sehingga Dinas Sosial Kota Dumai menetapkan beberapa persyaratan untuk penyandang cacat yang akan mendapatkan bantuan. Pemberian bantuan dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai, adalah pemberian pelatihan, ada yang dilakukan selama tiga (3) sampai enam (6) bulan. Tapi hasil yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan dengan masih ada Penyandang Cacat yang mendapat pelatihan tidak dapat mengembangkan keterampilan yang telah diberikan dan masih saja bergantung hidup dengan orang tua.

Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu tentang kebutuhan akan tenaga kerja lapangan yang secara langsung bersentuhan dengan kelompok sasaran. Keaktifan pekerja lapangan sangat mendukung Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai, karena salah satu faktor terpenting Penyandang Cacat mendapat bantuan yaitu perjuangan dari pekerja lapangan dalam merekomendasikan ke Dinas Sosial Kota Dumai agar mendapatkan bantuan. Apabila tenaga lapangan tersebut tidak aktif maka Penyandang cacat tidak akan tersentuh oleh Program Rehabilitasi Penyandang Cacat yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Dumai.

Kecukupan

Pembinaan dan pengawasan ada dilakukan dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai, namun hasilnya belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk melakukan pembinaan terhadap Penyandang Cacat di Kota Dumai.

Dengan tidak berjalannya secara maksimal pembinaan dan pengawasan terhadap Penyandang Cacat di Kota Dumai, menyebabkan para penyandang cacat yang sudah menerima bantuan tidak dapat me-

manfaatkan dengan. Bila pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan baik, tentu Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai dapat berjalan dengan baik.

Pemerataan

Pemerataan dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai kepada masyarakat sasaran berupa bantuan sosial yang diberikan tidak merata. Masih banyak Penyandang Cacat di Kota Dumai belum mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kota Dumai.

Hal ini terjadi disebabkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 23 jenis dan Penyandang cacat termasuk pada salah satu PMKS tidak semua Penyandang Cacat di Kota Dumai dapat menerima bantuan dari Dinas Sosial Kota Dumai. Hanya ada beberapa faktor saja Penyandang Cacat di Kota Dumai bisa mendapat bantuan dari Dinas Sosial Kota Dumai. Diantaranya yaitu: keaktifan dari PSM dalam mengajukan proposal bantuan ke Dinas Sosial, cacat yang dialami bersifat permanen dan sudah dalam jangka waktu yang lama, dan juga termasuk dalam keluarga yang tidak mampu.

Responsivitas

Masih banyak Penyandang Cacat di Kota Dumai yang tidak tanggap terhadap program yang ada, hal ini disebabkan oleh bantuan yang diterima terkadang tidak memberikan manfaat secara langsung terhadap kehidupan mereka. Dan bila mereka mengusulkan beberapa bantuan yang dirasakan akan cukup membantu untuk kehidupan mereka, maka tidak ada respon yang baik dari pelaksana kegiatan.

Selanjutnya respon tenaga pelaksana juga masih kurang, bisa dilihat dari tenaga pelaksana lapangan yang tidak aktif. Hal ini disebabkan rendahnya rasa peduli terhadap masalah kesejahteraan sosial yang ada di sekitar mereka dan juga tidak adanya gaji yang mereka terima dari Dinas Sosial Kota Dumai. Seharusnya Dinas Sosial Kota

Dumai mencari tenaga lapangan yang akan bekerja secara aktif menggantikan pelaksana lapangan yang tidak aktif. Tetapi Dinas Sosial juga harus memperhatikan kesejahteraan tenaga lapangan, sehingga mereka dapat bekerja secara maksimal. Dengan demikian, Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal.

Ketepatan

Ketepatan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai ada yang berguna dan bernilai. Tetapi untuk sebagian Penyandang Cacat tidak ada perubahan setelah mendapatkan bantuan dari program tersebut. Dinas Sosial Kota Dumai sebagai instansi yang melaksanakan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat, harus terus memberikan dukungan dan pendampingan kepada Penyandang Cacat yang sudah mendapatkan bantuan. Agar Penyandang Cacat tersebut mempunyai media untuk bertanya dan mengembangkan diri, sehingga Penyandang Cacat di Kota Dumai dapat hidup mandiri atau tidak membeban orang lain.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai tidak efektif, karena terfokus kepada pemberian bantuan kepada para Penyandang Cacat di Kota Dumai sedangkan untuk pemberdayaan setelah mendapat bantuan tersebut belum dilaksanakan dengan baik. Akibatnya pemberian bantuan ini tidak dapat meningkatkan kualitas hidup Penyandang Cacat di Kota Dumai. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai selanjutnya harus mendapatkan pemberdayaan setelah mendapat bantuan, agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Keaktifan petugas lapangan juga menentukan pemberdayaan para Penyandang Cacat di Kota Dumai. Petugas lapangan harus lebih aktif dalam memantau dan memoti-

vasi Penyandang Cacat supaya mereka lebih produktif setelah menerima bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Dumai. Dengan adanya pemberdayaan Penyandang Cacat tidak hanya mengharapkan bantuan yang ada tetapi juga mereka akan berusaha untuk lebih menggali kemampuan diri dan memanfaatkan bantuan yang telah diberikan.

Petugas lapangan harus aktif dan kreatif dalam pelaksanaan program rehabilitasi penyandang cacat, terutama dalam efektivitas pemanfaatan bantuan yang diberikan pemerintah. Apabila tenaga lapangan tidak aktif, maka penyandang cacat tidak tersentuh oleh program rehabilitasi penyandang cacat yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Dumai. Masih banyak ditemukan pekerja lapangan yang tidak aktif, karena tidak ada gaji yang mereka terima untuk melakukan kegiatan yang diadakan. Jadi efektivitas dan efisiensi program rehabilitasi penyandang cacat, selain ditentukan oleh pembuat kebijakan dan objek kebijakan penyandang cacat, tetapi juga ditentukan oleh pekerja lapangan sebagai ujung tombak kebijakan. Untuk mengaktifkan pekerja lapangan ini, diperlukan peningkatan kesejahteraan petugas lapangan dengan penambahan gaji bagi mereka telah aktif dan pemberian gaji bagi pekerja lapangan belum menerima gaji.

Hasil penelitian ini menunjukkan perlu kerjasama berbagai pihak dalam pelaksanaan program menurut Arikunto dan Safruddin (2009) pelaksanaan program dalam suatu organisasi selalu melibatkan sekelompok orang. Dengan adanya proses kerjasama didalam organisasi, maka kerja sama tersebut merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program.

SIMPULAN

Pelaksanaan Program Rehabilitasi Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kota Dumai belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan bila dilihat dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Efektivitas tidak terpenuhi dikarenakan tidak tercapainya tujuan

Program Rehabilitasi Penyandang Cacat dan belum dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka setelah mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kota Dumai. Kecukupan tidak terpenuhi karena tidak berjalannya secara maksimal pembinaan dan pengawasan terhadap Penyandang Cacat di Kota Dumai, sehingga para penyandang cacat yang sudah menerima bantuan tidak dapat memanfaatkan dengan baik bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Dumai. Pemerataan belum terwujud karena masih banyak Penyandang di Kota Dumai belum tersentuh atau belum mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kota Dumai. Responsivitas belum baik karena masih banyak Penyandang Cacat di Kota Dumai yang tidak tanggap terhadap program yang ada. Ketepatan terhadap bantuan yang diberikan kepada Penyandang Cacat di Kota Dumai belum dirasakan manfaatnya secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus, Erwan Purwanto dan Ratih Dyah Sulistyastuti, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta. Gava Media.
- Arikunto, Suharsimi dan safruddin, Cepi Abdul Jabar, 2009, *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Dunn, William N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua)*, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.